

Pembangunan 1000 km Jalan Tol : Kendala dan Tantangan

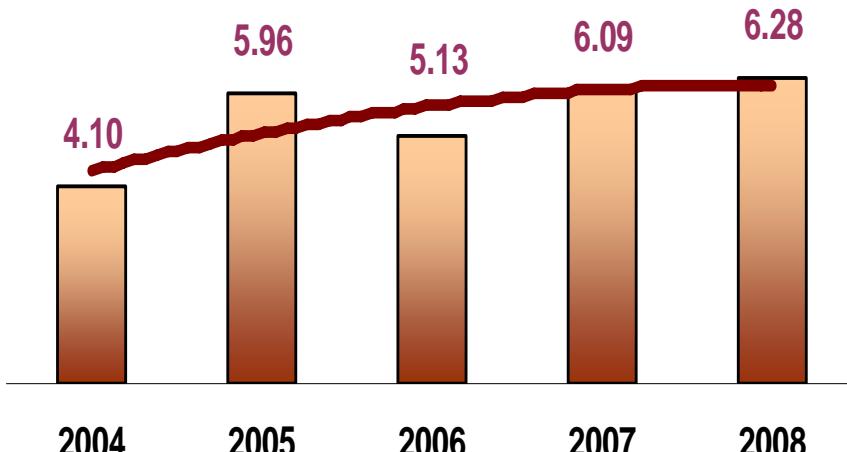
Konferensi Regional Teknik Jalan 10
Surabaya, 12 November 2008

Mesra Eza
Anggota HPJI no. B – 02499

Indonesia : Macroeconomic Outlook

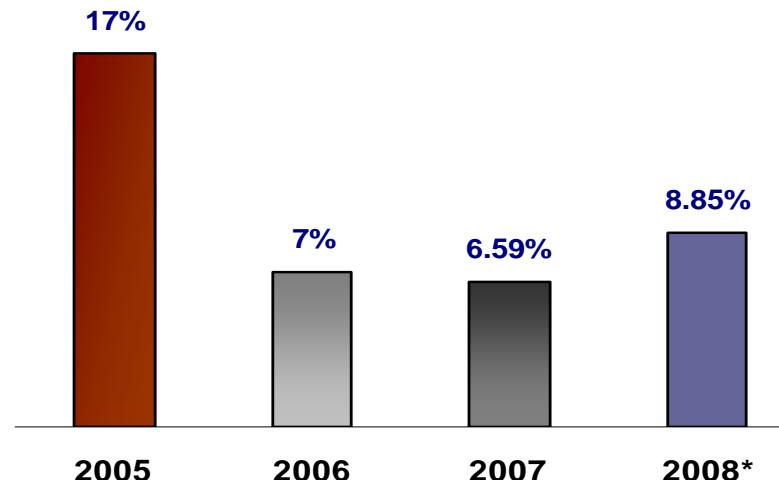
Economic Growth (Q1 –

%GDP Growth



Inflation Rate

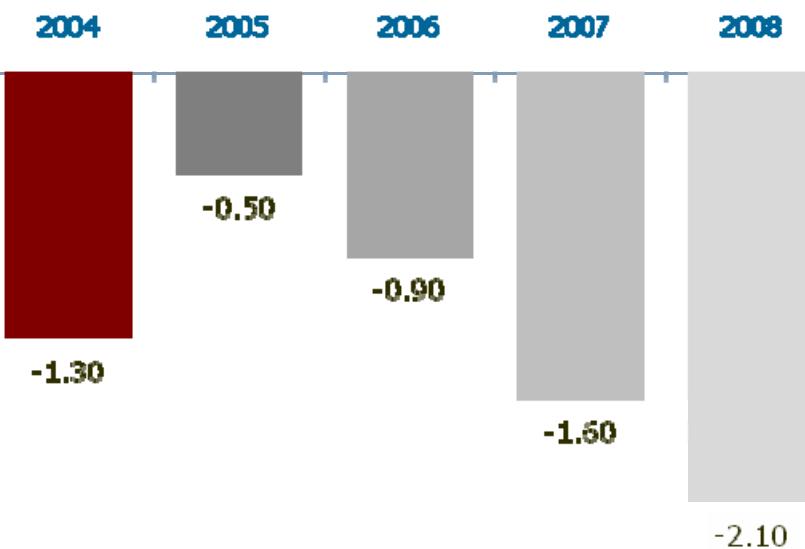
Inflation Rate (%)



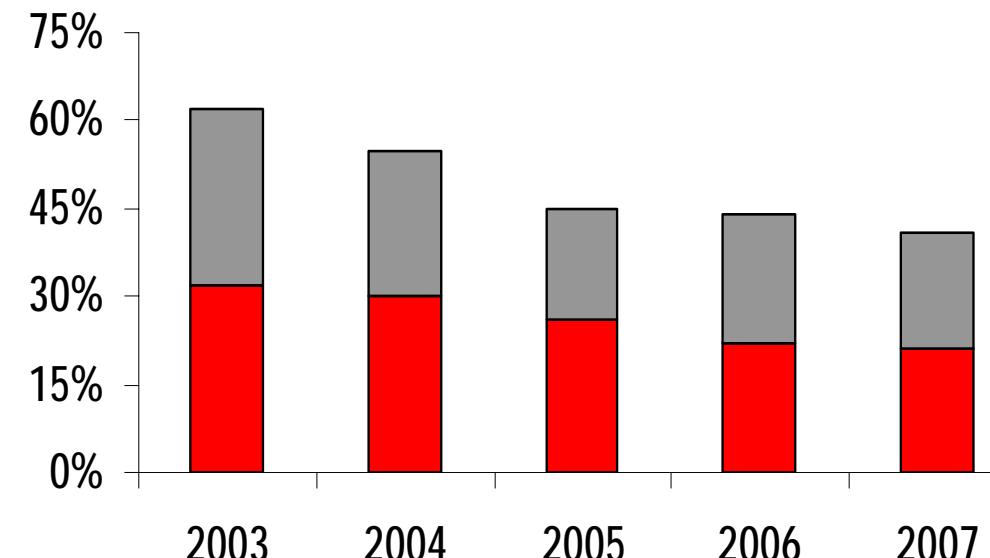
Indonesia : Macroeconomic Outlook

Budget Deficit

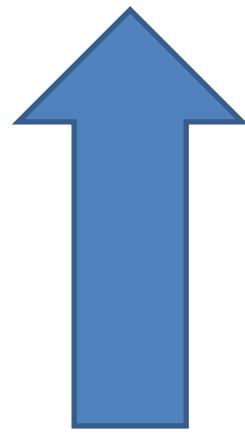
Budget Deficit (% of GDP)



Public Debt Ratio

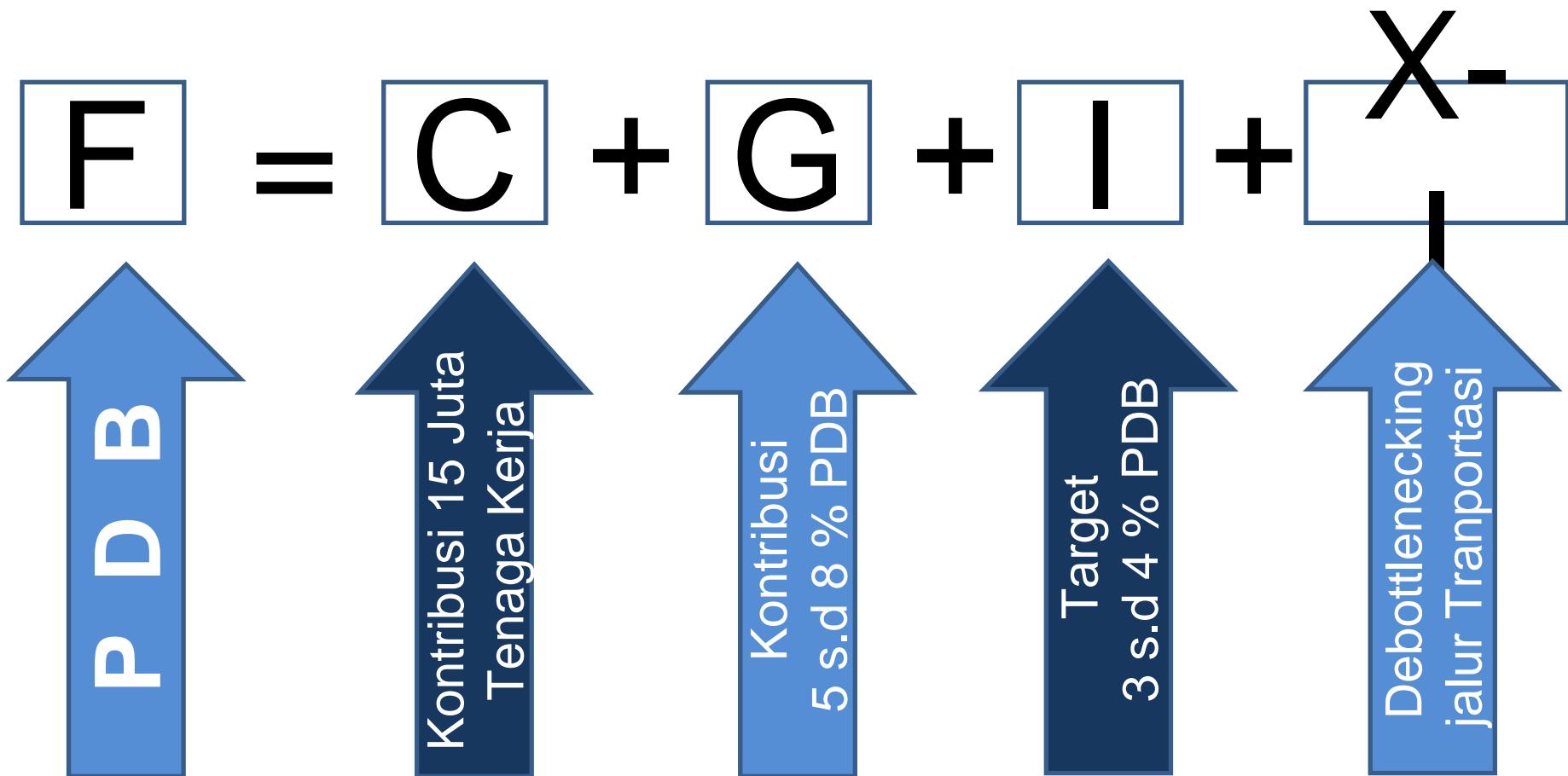


Apa prasyarat untuk mempertahankan Stabilitas Ekonomi Makro



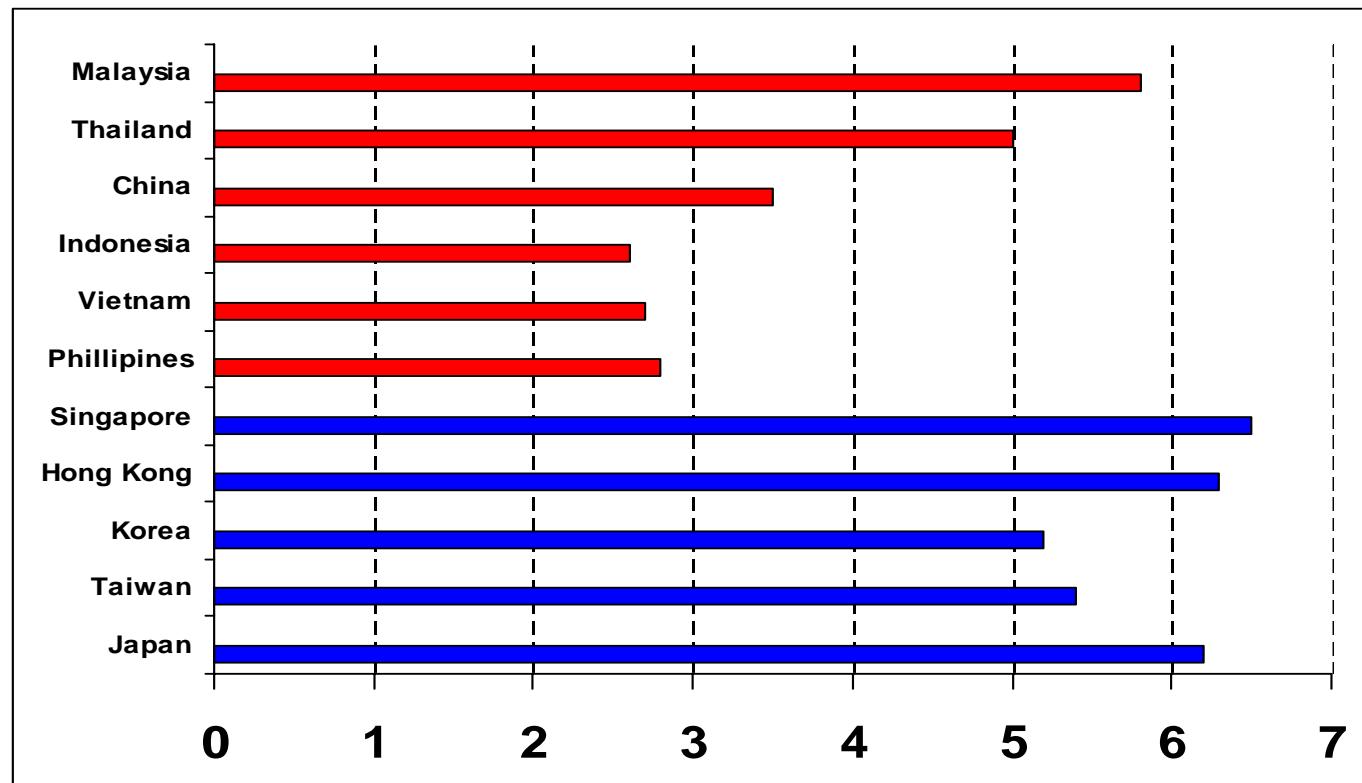
Fasilitas infrastruktur dengan kualitas yang tinggi

Kenapa...?????

 $F = PDB$ $C = \text{Consumption}$ $G = \text{Government Spending}$ $I = \text{Investment}$ $X - I = \text{Export} - \text{Import}$

Kondisi Infrastruktur Indonesia

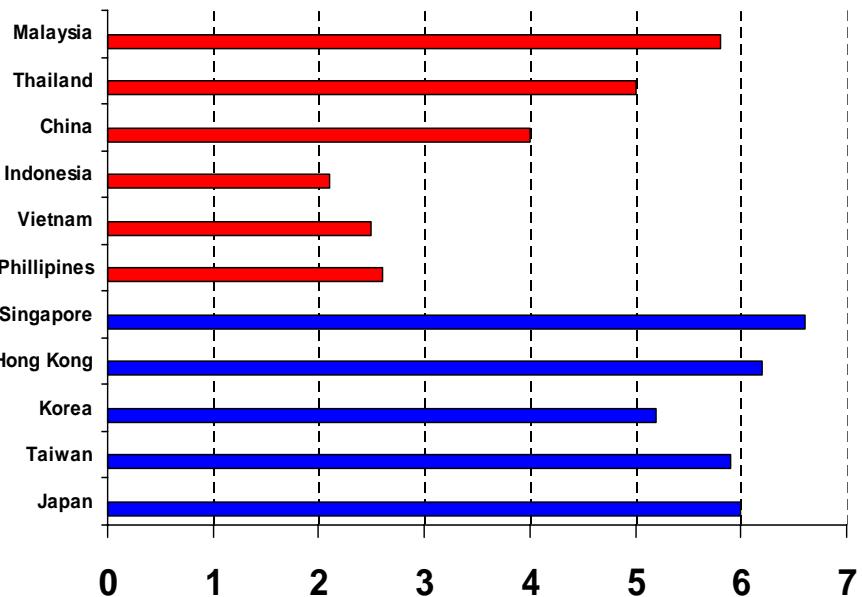
World Competitiveness Report Ranking, 2006-2007



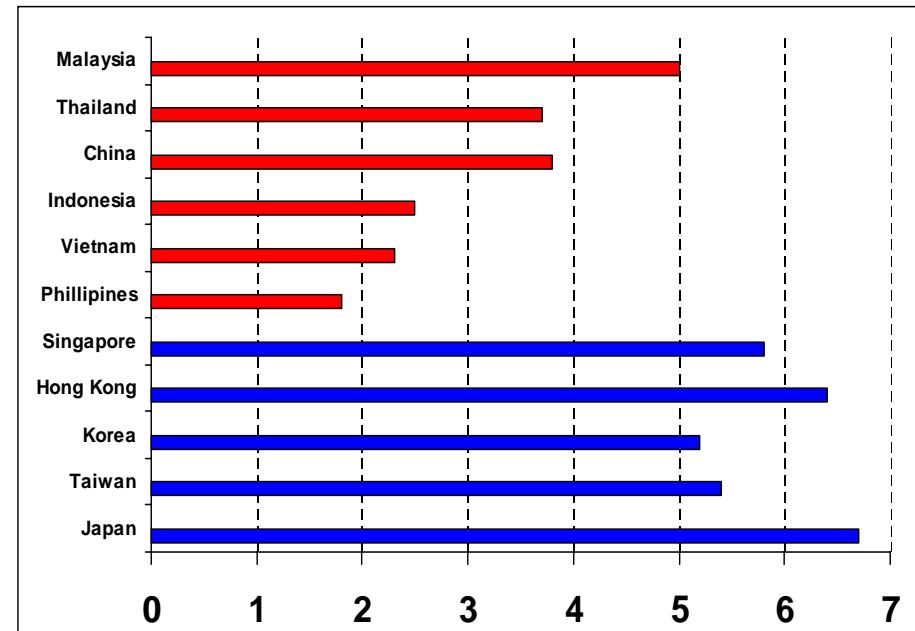
Source, ADBI, 2007

Roads and Railroads : Quality Ranking

Roads



Railroads



Source, ADBI, 2007

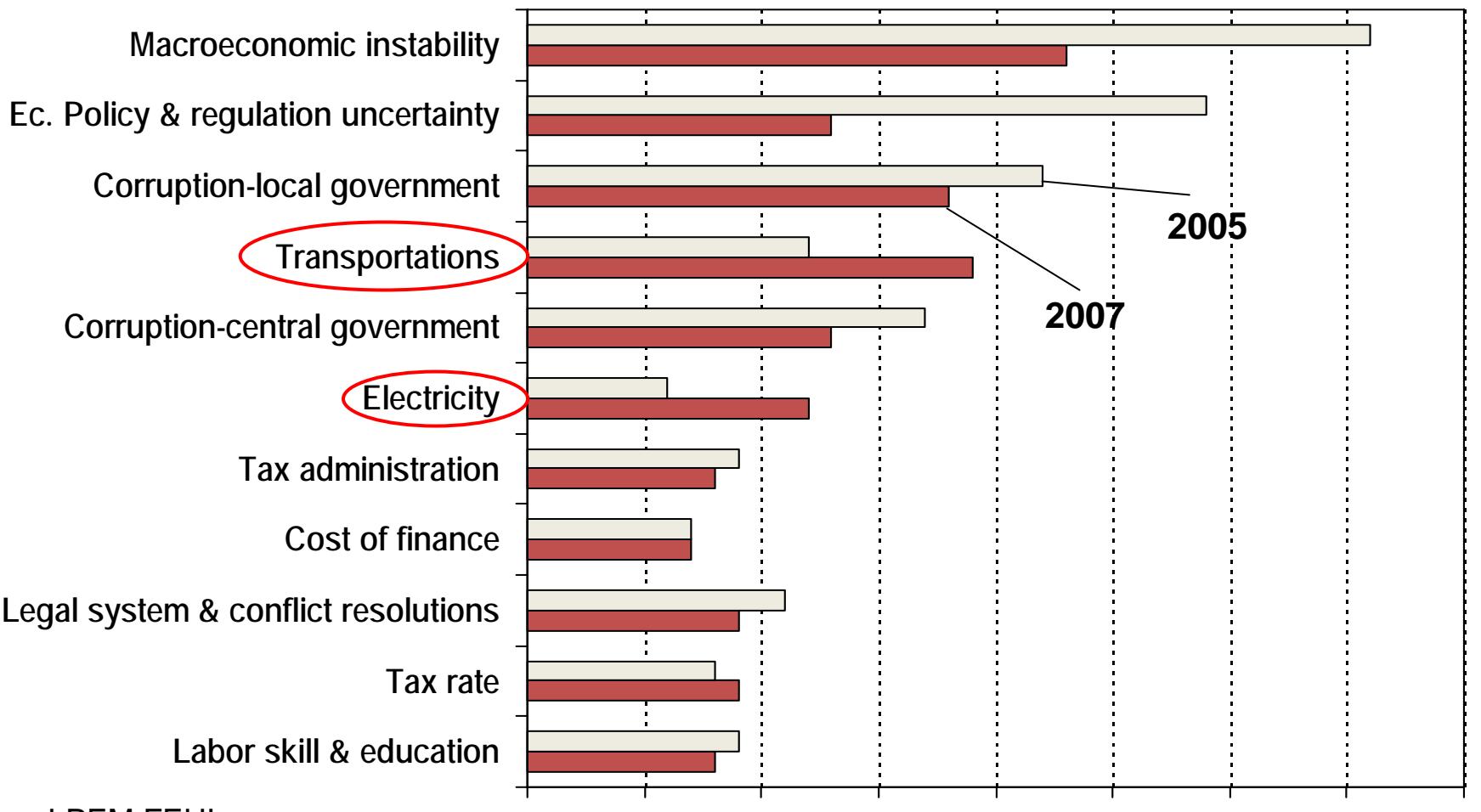
Indonesia Competitiveness Position

Global Competitiveness Report 2007 – 20008

- Competitiveness rank 54 out of 131
- Over all infrastructure rank 91 out of 131
- Quality of roads 113 out of 131
- Quality of port infrastructure 113 out 131
- Quality of railway infrastructure 62 out of 131
- Quality of air transport 62 out of 131

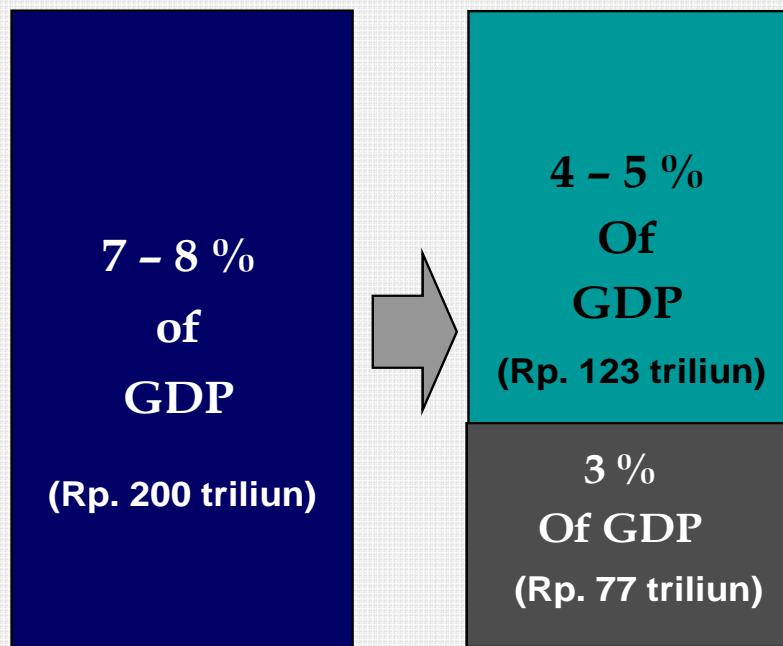
Constraints to investment

(% of firms reporting constraints to be moderate, severe, or very severe)



Investment Needs for Infrastructure in Indonesia

Infrastructure Annual Investment Needs 2005-2010



Annual Funding Gap



Government Budget

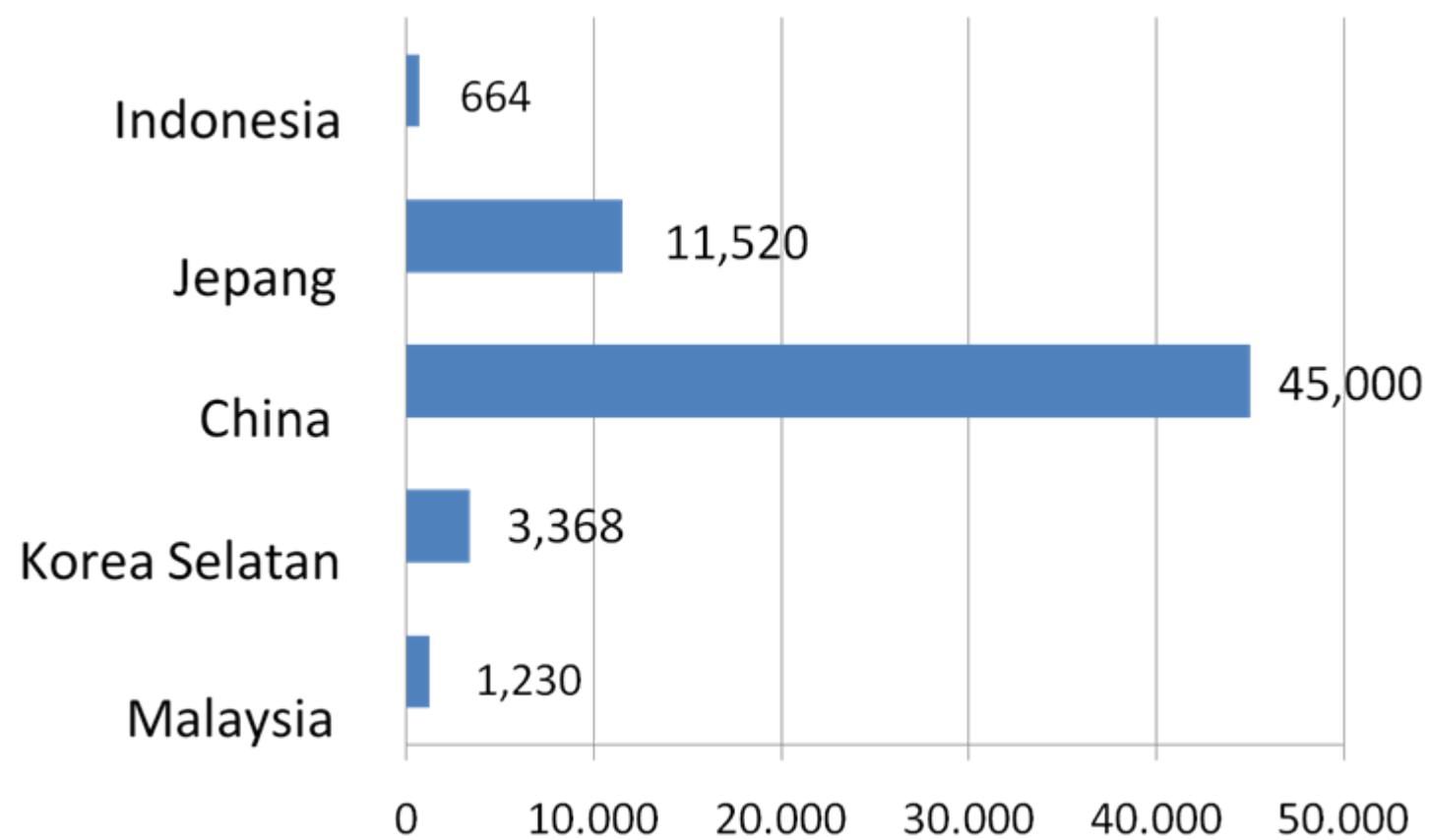
0-4 %	4-7%	Over 7%
Cambodia	Lao PDR	PRC
Indonesia	Mongolia	Thailand
Philippines	India	Vietnam

- Budgetary constraint
- The need to resort to private sector participation

Kronologis Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

- 1978, jalan tol pertama, Jagorawi sepanjang 46 km, mulai beroperasi
- 1998, setelah 20 tahun, baru beroperasi 595 km jalan tol
- 2004, UU no. 38 Tentang Jalan, menarik fungsi regulator dari PT Jasa Marga
- 2008, panjang jalan tol 676 km, bertambah 69 km setelah 10 tahun

Perbandingan Panjang Jalan Tol di Beberapa Negara Asia



Progres Pembangunan Jalan Tol

Progres Pembangunan Jalan Tol, 2008

		Panjang (km)	Nilai Investasi (Rp. Miliar)	Nilai Tanah (Rp. Miliar)
i.	Operasi	676,27		
ii.	PPJT (BOT) sepanjang 23 ruas			
	• Konstruksi (5 ruas)	109,10	8.028,79	403,31
	• Pembebasan Tanah (9 ruas)	432,26	27.108,67	3.879,67
	• Kritis (7 ruas)	228,18	28.741,16	3.943,74
	• Pemutusan kontrak PPJT (2 ruas)*	70,00	6.099,50	632,31
i iii.	Persiapan PPJT (6 ruas)	180,65	14.477,17	3.588,40
i v.	Persiapan Tender (11 ruas)	475,42	34.164,83	3.838,02
v.	Dibangun Pemerintah (4 ruas), skema DBO	75,91	9.846,70	1.978,70
vi.	Rencana Jalan Tol Terdalaman Kota Jakarta (6 ruas)	87,51	40.027,39	
vii.	Lain-lain (14 ruas)	789,58	73.805,15	7.036,33
TOTAL		3.087,88	239.447,36	

** BPT

Reformasi Legal Frame Work

UU no. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

- Fungsi regulator dikembelikan ke Pemerintah melalui BPJT
- Tarif tol dicantumkan dalam PPJT
- Evaluasi tarif dilakukan setiap 2 tahun
- Pemberlakuan tarif awal dan penyesuaian dilakukan oleh Menteri

Aturan Legal Pendukung Pembangunan Jalan Tol

- Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta
- PP 36/2005 dan Kepres 65/2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- Perpres no 43/2005 tetang KKPPPI
- Permenko no. 38/PMK.01/2006, Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas penyediaan Infrastruktur

Tujuan Reformasi Legal Frame Works (1)

- Memayungi prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterimanya
- KPS yang akuntabel, keterbukaan, kompetisi dan saling menguntungkan
- Dua prinsip pengadaan tanah 1). Pelepasan hak dan 2). Pencabutan hak
- Dukungan fiskal terhadap proyek yang kelayakan ekonomi baik tapi kelayakan finansial kurang memadai.

Tujuan Reformasi Legal Frame Works (2)

- “Guarantee” terhadap risiko selama masa konsesi. Risiko : politik, kinerja dan KPS yang akuntabel, keterbukaan, kompetisi dan saling menguntungkan
- Memberi wewenang kepada KKPI, menentukan strategi koordinasi penyelesaian permasalahan lintas sektor.

Pokok Permasalahan Pembangunan Jalan Tol

Pengadaan tanah dan pendanaannya

Rendahnya minat pasar untuk
melakukan investasi di jalan tol

Pengadaan tanah dan pendanaannya

Pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah tetapi pembiayaan dari investor

Penyelesaian ketidaksepakatan harga antara pemilik tanah dan P2T berlarut-larut

Pemegang PPJT tidak mampu mendapatkan pendanaan dari Bank.

Minat Pasar Rendah Berinvestasi di Jalan Tol

Rekapitulasi Pelelangan 25 Ruas Jalan Tol

NO	KATEGORI	JUMLAH PESERTA PQ	LULUS PQ	PEMASUKKAN PENAWARAN
1	>= 3 Peminat	12	12	1
2	2 Peminat	2	-	4
3	1 Peminat	3	1	5
4	Tidak ada peminat	4	8	11
5	Sedang dalam proses PQ	4	-	-
Total		25	21	21

Rekapitulasi Pelelangan Batch 1

NO	RUAS	JUMLAH PESERTA	LULUS PQ	PEMASUKAN PENAWARAN
1	Medan - Binjai	8	4	-
2	Cileunyi - Sumedang - Da	7	3	-
3	Depok - Antasari	19	9	2
4	Cinere - Jagorawi	20	10	4
5	Cikarang - Tj.Priok	18	5	2
6	Makassar Seksi IV	8	4	2

Rekapitulasi Pelelangan Batch 2

NO	RUAS	JUMLAH PESERTA	LOLOS PQ	PEMASUKAN PENAWARAN
1	Cengkareng - Bt. Ceper - Kunciran	5	3	1
2	Kunciran - Serpong	6	4	1
3	Serpong - Cinere	5	4	1
4	Cimanggis - Cibitung	5	3	2
5	Pasirkoja - Soreang	2	1	-
6	Pekanbaru - Kandis	2	-	-
7	Bakauheni - Terbanggi Besar	1	-	-
8	Serangan - Tj. Benoa	1	-	-
9	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	1	-	-
10	Manado - Bitung	-	-	-
11	Semarang - Demak	-	-	-
12	Medan - Binjai	-	-	-
13	Cileunyi - Sumedang	-	-	-

Rekapitulasi Pelelangan Batch 3

No.	RUAS/KELOMPOK	JUMLAH PESERTA PQ	LULUS PQ	PEMASUKKAN PENAWARAN
1	SOLO - NGAWI	4	3	1
2	NGAWI - KERTOSONO	4	3	1

Rekapitulasi Pelelangan Batch 4

NO	RUAS	JUMLAH PESERTA	LULUS PQ	PEMASUKAN PENAWARAN
1	Medan - Binjai	2		-
2	Palembang - Indralaya	1		-
3	Tegineneng - Babatan	2		
4	Pandaan - Malang	3	2	

Evaluasi

Pengadaan tanah dan pendanaannya

- Berlarutnya penyelesaian ketidaksepakatan harga lebih karena ketidaktegasan pemerintah
- UU no 21/1961 memberikan payung hukum untuk melakukan pencabutan hak atas tanah jika diperlukan untuk kepentingan umum
- Investor melihat klausul pengadaan pembiayaan tanah tidak rasional, dana dari investor, tetapi tidak punya kontrol terhadap pelaksanaan pengadaan tanah.

Minat Pasar Rendah Berinvestasi di Jalan Tol

- Proxy, jika suatu proyek mempunyai kelayakan finansial yang baik, dan kepastian bisnis yang jelas, investor akan tertarik untuk berinvestasi.
- Tidak ada dukungan dan jaminan pemerintah selama masa konsesi yang relatif panjang, risiko tinggi

“Fact Finding” dari Pelelangan 25 Jalan Tol

- Pemerintah pada posisi 25 ruas jalan tol layak secara finansial sehingga ditawarkan kepada investor
- Tidak ada dukungan / jaminan pemerintah
- Risiko tidak ditempatkan pada pihak yang paling layak menanggung
- Lembaga pelelangan menganggap PPJT mempunyai banyak aspek ketidakpastian, sehingga tidak “bankable”

Kesimpulan

1. Dalam menyusun PPJT, risiko harus ditempatkan pada pihak yang punya kontrol terhadap risiko.
2. Dimensi finansial adalah dimensi tambahan yang sangat penting dalam pengelolaan jalan tol dan sangat erat kaitannya lembaga keuangan. Karena itu aspek transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan menjadi sangat penting.
3. Mitra utama pemerintah dalam mengelola jalan tol adalah investor, pihak yang menyandang pendanaan. Investor adalah penyedia dana, bukan pihak yang bekerja mengandalkan dana pemerintah dengan demikian diperlukan “mindset” berbeda.

4. Kajian finansial harus dilakukan dengan akurat, jika diperlukan dukungan/guarantee pemertintah, harus dicantumkan dari awal sejak proses tender.
5. Sektor pengelola jalan tol, pengendali fiskal, perencana pembangunan nasional dan KKPPI harus bersinergi lebih baik untuk menghasilkan proyek jalan tol yang "market friendly" serta memberikan manfaat optimal kepada publik.

Terima kasih